

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses yang dilakukan terus-menerus untuk mencapai tujuan suatu negara atau daerah dengan berbagai upaya yang terencana dan terprogram. Pembangunan tidak hanya berfokus pada fenomena ekonomi suatu daerah, tetapi juga terhadap fenomena sosial dimana pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus diiringi dengan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Menurut Amartya Sen dalam (Pradana et al., 2024) dan (Iswahyudi & Asnawi, 2024), kebebasan merupakan tujuan utama dari upaya pembangunan serta efektif untuk mencapai kesejahteraan. Teori Kapabilitas Sen berfokus pada kemampuan individu dalam mencapai hal-hal yang dianggap penting dalam hidupnya. Teori ini menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah, seperti belanja pemerintah dalam peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar dapat berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, faktor yang dapat mengukur kemampuan individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya adalah pendapatan. Tingkat pendapatan atau upah yang lebih tinggi dapat membantu seseorang yang bekerja dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Namun, terdapat faktor lain yang digunakan untuk mengukur kapabilitas individu, yaitu kemiskinan. Kemiskinan tidak hanya mengenai rendahnya produktivitas atau aset yang dimiliki individu, tetapi juga rendahnya kemampuan individu dalam mencapai hal-hal yang dianggap penting dalam hidupnya sehingga dengan adanya kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan

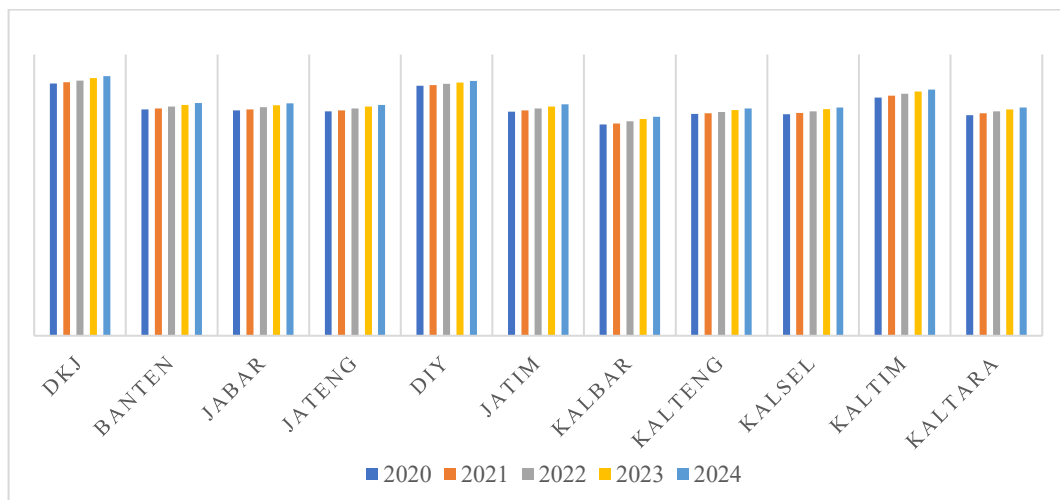
masyarakat serta kurangnya kemampuan individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dapat mempengaruhi keberhasilan pembangunan suatu daerah.

Pembangunan manusia adalah salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup manusia di suatu daerah. United Nations Development Programme (UNDP) tahun 1990 dalam publikasi BPS (2024), dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR) memperkenalkan konsep mengenai pengukuran pembangunan manusia yang dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*). IPM menjelaskan bagaimana masyarakat bisa mengakses hasil dari pembangunan melalui pendidikan, kesehatan, pendapatan, serta aspek lain dalam kehidupan.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki capaian IPM yang berbeda di setiap daerahnya bahkan terdapat perbedaan signifikan di beberapa wilayah. Hal ini disebabkan karena terdapat perbedaan seperti karakteristik ekonomi, sosial, dan demografi di setiap provinsi sehingga pemerintah harus membuat kebijakan yang spesifik dan terarah dalam upaya peningkatan IPM di setiap daerah. Contohnya, Pulau Jawa dan Kalimantan, dimana kedua pulau tersebut memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional.

Pulau Jawa, sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pusat pemerintahan, serta Pulau Kalimantan, sebagai lokasi dari ibu kota negara yang baru menjadikan kedua wilayah tersebut mendapatkan prioritas dalam pembangunan, termasuk pengembangan infrastruktur dalam skala besar, peningkatan standar upah minimum, serta alokasi anggaran yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lain. Hal ini dilakukan sebagai upaya agar Jawa dapat mempertahankan daya saingnya, serta

Kalimantan dapat menjadi motor penggerak pembangunan agar lebih merata sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kedua wilayah tersebut dan mampu menciptakan dampak positif yang meluas ke seluruh wilayah di Indonesia. Namun, di sisi lain kemiskinan masih menjadi tantangan utama karena dapat menghambat akses masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidupnya.



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Gambar 1. 1
IPM Provinsi-Provinsi Di Pulau Jawa Dan Kalimantan
Tahun 2020 – 2024 (Persen)

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa capaian IPM di provinsi-provinsi di kedua pulau tersebut mengalami peningkatan setiap tahunnya. Capaian IPM di Provinsi Daerah Khusus Jakarta selalu lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi lain. Pada tahun 2020, IPM di Provinsi DKI mencapai 80.77%, sedangkan pada tahun 2024 mencapai 83.08% artinya IPM di Provinsi DKI mengalami peningkatan sebesar 2.31%. Hal ini terjadi karena sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan, provinsi DKI mendapat alokasi anggaran yang lebih besar yang mendukung pengembangan fasilitas publik dan program-program kesejahteraan masyarakat.

Di posisi kedua, capaian IPM tertinggi yaitu Provinsi D.I Yogyakarta dimana sejak tahun 2021 IPM di provinsi ini sudah termasuk ke dalam kategori IPM sangat tinggi yaitu sebesar 80.22% dan terus meningkat hingga 81.55% di tahun 2024. Selanjutnya, di posisi ketiga Provinsi Kalimantan Timur dimana provinsi ini memiliki capaian IPM yang tinggi dibandingkan provinsi lainnya di Pulau Jawa dan Kalimantan, seperti pada tahun 2024 mencapai 78.83%, lebih tinggi dari IPM nasional sama seperti provinsi DKI dan DIY dimana capaian IPM Indonesia sebesar 75.02% pada tahun 2024. Capaian IPM di Kalimantan Timur ini didukung oleh beberapa faktor seperti akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang baik, serta dampak positif dari pembangunan IKN, seperti percepatan pembangunan infrastruktur.

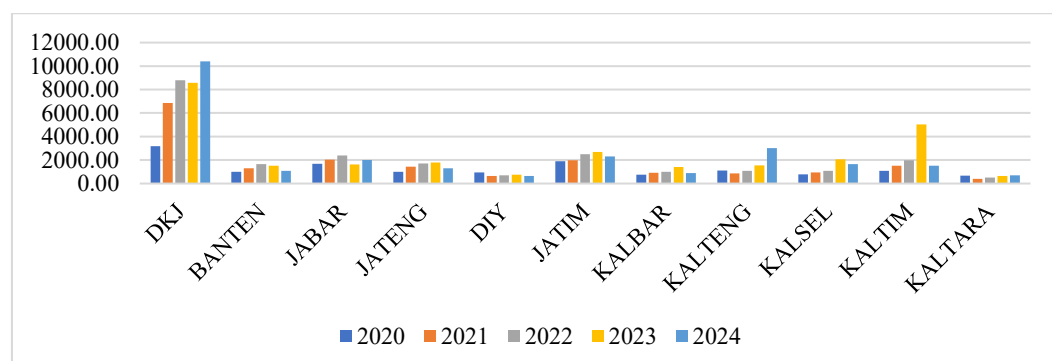
IPM di Provinsi Jawa Timur tidak berbeda jauh dengan provinsi lainnya di kedua pulau tersebut, yaitu berada di angka 73% di tahun 2024. Sedangkan, capaian IPM terendah terdapat di Provinsi Kalimantan Barat, meskipun begitu IPM di Kalimantan Barat meningkat setiap tahunnya dan termasuk IPM berstatus tinggi pada tahun 2024 sebesar 70.13%.

Meskipun capaian indeks pembangunan manusia di pulau Jawa dan Kalimantan meningkat setiap tahunnya, peningkatan IPM di beberapa provinsi lebih lambat, seperti di Kalimantan Tengah, Banten, dan Jawa Tengah yang hanya mengalami peningkatan IPM 0.2 sampai 0.3 persen pada tahun 2021. Adapun rata-rata peningkatan IPM di Kalimantan Tengah hanya 0.42 persen. Selain ketiga provinsi tersebut, peningkatan IPM di Provinsi DIY pun lebih lambat dibanding provinsi lainnya. Meskipun capaian ipm nya termasuk kategori sangat tinggi, rata-

rata peningkatan dari tahun ke tahun hanya sekitar 0.4 persen, berbeda dengan provinsi lainnya yang memiliki rata-rata peningkatan sebesar 0.6 hingga 0.65 persen sehingga selain masih terdapat kesenjangan dalam capaian keberhasilan pembangunan manusia, peningkatan ipm di beberapa provinsi di kedua pulau tersebut lebih lambat dibandingkan provinsi lainnya.

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan ini terdapat beberapa kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah, salah satunya adalah desentralisasi fiskal yang merupakan transfer kewenangan dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan seperti pengalokasian dana belanja daerah yang akan dialokasikan, salah satunya dalam bentuk belanja modal.

Belanja modal adalah pengeluaran pemerintah melalui penambahan aset tetap atau aset lainnya seperti tanah, bangunan, infrastruktur atau fasilitas lainnya (Irianto et al., 2021). Belanja modal merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan akses yang lebih baik terhadap fasilitas dan layanan publik yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat (Jatnika et al., 2024).



Sumber: DJPK Kemenkeu (diolah).

Gambar 1. 2
Realisasi Belanja Modal Provinsi-Provinsi Di Pulau Jawa Dan Kalimantan
Tahun 2020 – 2024 (Milyar Rupiah)

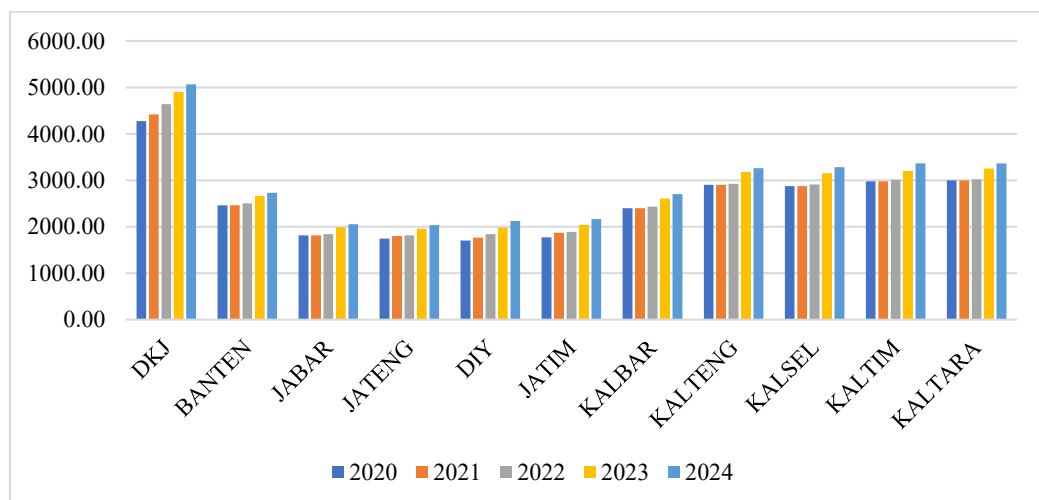
Realisasi belanja modal mengalami fluktuasi di setiap provinsi selama periode 2020-2024. Dari data tersebut, sebagian besar provinsi mengalami peningkatan jumlah realisasi belanja modal pada tahun 2021 dan 2022, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2023 pada beberapa provinsi. Hal ini mengindikasikan adanya perubahan prioritas dan fokus kebijakan pembangunan daerah yang dipengaruhi oleh efisiensi alokasi anggaran dan kondisi ekonomi. Di sisi lain, Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan pola peningkatan dari tahun 2020 sampai 2023, dengan Kalimantan Timur mencatat puncak tertinggi pada 2023 sebesar Rp5.023,48 miliar. Peningkatan ini salah satunya disebabkan oleh adanya alokasi dana yang signifikan untuk pembangunan infrastruktur dalam mendukung percepatan transisi IKN sebagai pusat pemerintahan baru.

Realisasi belanja modal di Provinsi DIY dan Kalimantan Utara lebih rendah dibandingkan provinsi lainnya yang dapat disebabkan oleh faktor-faktor, seperti pendapatan asli daerah yang dihasilkan relatif rendah sehingga kemampuan daerah untuk mengalokasikan anggaran ke belanja modal lebih terbatas serta sering kali prioritas anggaran terhadap belanja modal lebih kecil.

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa belanja modal di setiap provinsi mengalami fluktuasi, sedangkan capaian IPM nya meningkat setiap tahunnya. Artinya, dari data tersebut menunjukkan bahwa penurunan belanja modal tidak memberikan pengaruh negatif terhadap IPM dikarenakan belanja modal merupakan investasi jangka panjang sehingga berpengaruh terhadap peningkatan IPM di tahun-tahun berikutnya. Penelitian yang dilakukan oleh Nisa & Handayani (2021) dan Handayani & Woyanti (2021) menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh

positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Dimana dengan terpenuhinya fasilitas publik dapat meningkatkan kualitas hidup manusia. Namun, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratama & Ariza (2024) yang menyimpulkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

Upah minimum merupakan kebijakan pemerintah lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Faizin, 2021). Menurut UU No.6 Tahun 2023, Kebijakan upah minimum ditetapkan untuk melindungi pekerja dari rendahnya upah yang diberikan sehingga diharapkan memberikan dampak terhadap kualitas hidup pekerja dan keluarganya.



Sumber: Satudata Kemnaker RI (diolah)

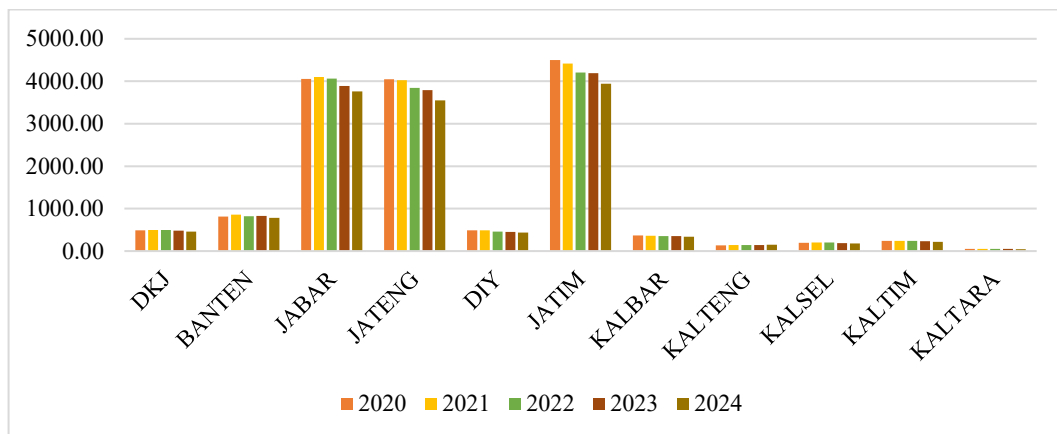
Gambar 1.3
Upah Minimum Provinsi Di Pulau Jawa Dan Kalimantan
Tahun 2020 – 2024 (Ribu Rupiah)

Berdasarkan Gambar.1.3 menunjukkan bahwa sebagian besar provinsi di kedua pulau tersebut mengalami kenaikan besaran upah minimum yang relatif stabil dan cenderung meningkat setiap tahunnya. Misalnya, di Provinsi Kalimantan

Selatan pada tahun 2022 sebesar 2906.47 ribu rupiah, kemudian meningkat pada tahun 2023 menjadi 3149.98 ribu rupiah, begitu pula di provinsi lainnya. Kenaikan ini mencerminkan adanya penyesuaian terhadap tingkat inflasi dan kebutuhan hidup yang terus meningkat, serta dampak dari kebijakan pemerintah dalam menjaga kesejahteraan tenaga kerja.

Tren positif pada upah minimum sejalan dengan peningkatan terhadap indeks pembangunan manusia di Pulau Jawa dan Kalimantan tersebut. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Pratama & Ariza (2024) yang menyimpulkan bahwa upah minimum memberikan pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Sekadau. Begitu pun dengan penelitian yang dilakukan oleh Husna et al. (2024) dan Faizin (2021) dimana upah minimum berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia.

Selain kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah untuk mencapai keberhasilan pembangunan, terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi pembangunan manusia, yaitu masalah kemiskinan (Handayani & Woyanti, 2021). Kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana seseorang tidak memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhannya. Kemiskinan dapat mengakibatkan penurunan taraf hidup masyarakat sehingga berdampak pada terbatasnya pemenuhan kebutuhan sehari-hari (Nasution, 2019) dalam (Faizin, 2021). Dengan terbatasnya kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, mengakibatkan individu tidak mampu memenuhi kebutuhan lain seperti pendidikan dan kesehatannya, sehingga dapat menghambat tingkat kesejahteraan masyarakat.



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Gambar 1.4
Jumlah Penduduk Miskin Di Pulau Jawa Dan Kalimantan
Tahun 2020 – 2024 (Ribu Jiwa)

Gambar 1.4 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa dan Kalimantan memiliki perbedaan yang signifikan antar provinsi. Berdasarkan data tersebut, jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur jauh lebih tinggi dibanding provinsi lainnya. Pada tahun 2020, Provinsi Jawa Timur menyumbangkan jumlah penduduk miskin sebesar 4.502 Ribu jiwa atau 4.5 Juta jiwa, disusul oleh provinsi Jawa Barat sebesar 4.054 Ribu jiwa, dan Jawa Tengah sebesar 4.050 Ribu jiwa. Hal ini salah satunya disebabkan karena jumlah penduduk di ketiga provinsi tersebut yang sangat besar, sehingga akses terhadap fasilitas dan infrastruktur menjadi lebih terbatas.

Berbanding terbalik dengan Provinsi Jawa Timur, jumlah penduduk miskin di Kalimantan Utara jauh lebih rendah dibandingkan provinsi lainnya di Pulau Jawa dan Kalimantan, contohnya pada tahun 2020 sebesar 52 ribu jiwa. Salah satu penyebabnya karena pemanfaatan sumber daya alam, seperti hasil tambang dan hutan memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal dan meningkatkan taraf hidupnya.

Banyaknya jumlah penduduk miskin menjadi salah satu penghambat dalam mencapai kesejahteraan masyarakat, sebaliknya penurunan jumlah penduduk miskin dapat meningkatkan capaian keberhasilan pembangunan. Meskipun masih terdapat masalah kemiskinan di Pulau Jawa dan Kalimantan, terutama di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, namun jumlah penduduk miskin cenderung menurun setiap tahunnya. Kemiskinan yang terus menurun ini, diikuti dengan capaian IPM yang meningkat. Artinya, kesejahteraan masyarakat akan meningkat ketika kemiskinan berkurang. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mardiko & Rospida (2023) dan Kartika et al., (2024) yang menunjukkan bahwa kemiskinan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Namun, hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Maulana et al., (2022) dimana kemiskinan tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. justru memiliki pengaruh positif terhadap IPM di kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Berdasarkan data dan penelien-penelitian sebelumnya, masih terdapat beberapa inkonsistensi antara satu penelitian dengan penelitian lainnya dimana terdapat hasil penelitian yang sesuai dengan teori, tetapi ada pula yang hasilnya bertentangan. Oleh karena itu, penulis menjadikan perbedaan dari hasil penelitian-penelitian tersebut sebagai celah penelitian (*research gap*). Celah penelitian dalam penelitian ini adalah *empirical gap* yang muncul karena masih terdapat ketidaksesuaian dari beberapa hasil penelitian.

Selain itu, penulis mengidentifikasi bahwa variabel belanja modal, upah minimum, dan kemiskinan belum banyak diteliti kaitannya terhadap indeks

pembangunan manusia secara bersama-sama khususnya di Pulau Jawa dan Kalimantan, sehingga dapat menjadi kajian menarik untuk menganalisis bagaimana kaitan antara ketiga variabel tersebut terhadap indeks pembangunan manusia.

Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **“Pengaruh Belanja Modal, Upah Minimum, dan Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Jawa dan Kalimantan Tahun 2017–2024”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh belanja modal, upah minimum, dan kemiskinan secara parsial terhadap indeks pembangunan manusia di Pulau Jawa dan Kalimantan pada tahun 2017–2024?
2. Bagaimana pengaruh belanja modal, upah minimum, dan kemiskinan secara simultan terhadap indeks pembangunan manusia di Pulau Jawa dan Kalimantan pada tahun 2017–2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pengaruh belanja modal, upah minimum, dan kemiskinan secara parsial terhadap indeks pembangunan manusia di Pulau Jawa dan Kalimantan pada tahun 2017–2024.

2. Untuk mengetahui pengaruh belanja modal, upah minimum, dan kemiskinan secara simultan terhadap indeks pembangunan manusia di Pulau Jawa dan Kalimantan pada tahun 2017–2024.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1. Kegunaan Pengembangan Ilmu

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan, serta diharapkan bisa menjadi rujukan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian mengenai pengaruh belanja modal, upah minimum, dan kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia.

1.4.2. Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis serta dapat mengetahui lebih jauh mengenai capaian indeks pembangunan manusia di Pulau Jawa dan Kalimantan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti lain dapat menggunakan penelitian ini sebagai dasar untuk melakukan studi perbandingan antara Pulau Jawa dan Kalimantan dengan daerah lain atau bahkan negara lain dengan karakteristik ekonomi serupa.

3. Bagi Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam merancang alokasi anggaran belanja modal, penetapan upah, serta menyusun strategi pengentasan kemiskinan untuk mengoptimalkan capaian Indeks Pembangunan Manusia.

